

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan penduduk yang tinggi di Indonesia merupakan kendala utama peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat di bidang pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lapangan pekerjaan. Setiap tahun jumlah penduduk di Indonesia semakin meningkat, dan pemerintah berusaha untuk mengatasi masalah tersebut.

Pembangunan kependudukan yang berwawasan, merupakan salah satu peran utama bagi pemerintah untuk mengatasi masalah pertumbuhan penduduk. Namun persoalannya, selama ini data penduduk yang komprehensif masih terbatas. Otonomi daerah menempatkan kabupaten atau kota sebagai pusat-pusat pembangunan yang berkewenangan mengatur dan menentukan arah pembangunannya. Masalah pembangunan yang berwawasan kependudukan dan berkelanjutan harus mengacu pada kerangka pembangunan nasional. Pembangunan yang berwawasan kependudukan dan berkelanjutan diperlukan proyeksi penduduk yang dirinci menurut kelompok umur, jenis kelamin, dan wilayah tertentu guna menunjang pemenuhan kebutuhan informasi kependudukan dalam merencanakan kebijakan sektor maupun program intervensi sektoral terkait dalam upaya peningkatan kualitas dan kesejahteraan penduduk.

Pembangunan merupakan suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga

negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. Pembangunan dibagi menjadi tiga tipe wilayah secara umum yaitu :

1. Wilayah secara fungsional dicirikan oleh adanya derajat integrasi antara komponen-komponen di dalamnya yang berinteraksi ke dalam wilayah alih-alih berinteraksi ke wilayah luar.
2. Wilayah homogen yaitu adanya relatif kemiripan relatif dalam wilayah. Kemiripan ciri tersebut dapat dilihat dari aspek sumber daya alam (iklim dan komoditas), sosial (agama, suku, kelompok, ekonomi), ekonomi (sektor ekonomi).
3. Wilayah administratif dibentuk untuk kepentingan pengelolaan atau organisasi oleh pemerintah maupun pihak-pihak lain.

Selain masalah pembangunan yang berwawasan kependudukan dan berkelanjutan maka ada pula masalah perencanaan pembangunan wilayah yang konsepnya utuh dan menyatu dengan pembangunan wilayah. Di dalam perencanaan pembangunan wilayah ada proses perencanaan pembangunan nasional yang meliputi tiga hal yaitu :

1. Perencanaan pembangunan yang didasarkan oleh jangka panjang (PJP) periode 25 tahun, rencana pembangunan jangka menengah periode 5 tahun (Repelita), dan rencana jangka pendek tahunan (Repeta) yang tertuang dalam RAPBN.
2. Perencanaan pembangunan makro yaitu : perencanaan pembangunan nasional dalam skala makro atau menyeluruh.
3. Berdasarkan prosesnya dari perencanaan pembangunan bawah ke atas dan dari atas ke bawah, yang seharusnya diikuti karena dipandang sebagai kebutuhan nyata, dan menerapkan cara penjabaran rencana induk ke dalam rencana rinci.¹

Perencanaan pembangunan menimbulkan masalah kependudukan yang terjadi di daerah pedesaan yang merupakan isu utama dalam hubungannya dengan pembangunan di Indonesia. Dilihat dari segi penyebabnya, kependudukan merupakan isu yang paling penting yang terjadi akhir-akhir ini. Mengingat bahwa pada data kependudukan tahun 2010 di Kabupaten Kulon Progo terjadi kecurangan yang mengakibatkan turunnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan digulirkan pemerintah

¹ Iwan Nugroho dan Rochmin Dahuri, Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan, LP3ES, Jakarta, 2004 hal 77

pusat di Kabupaten Binangun, peran pemerintah Kabupaten Kulon Progo sangat dibutuhkan dalam mengatasi masalah ini.

Formulasi statistik yang kompleks ini digunakan untuk hitungan terkait besaran DAU. Variabel itu diantaranya jumlah penduduk dan luasan wilayah. Jika data dari BPS jauh lebih kecil dari kenyataan di lapangan, maka tentu DAU yang diterima Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menyusut. Pemerintah berperan untuk menuntaskan data-data yang dirasa kurang sehingga DAU yang diterima mengalami penurunan.

Berbagai kebijakan dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar program proyeksi kependudukan mempunyai kekuatan dalam membina perkembangan potensi wilayah. Sehingga dalam tahun yang akan datang, masalah penghitungan kependudukan bisa lebih tepat.

Namun ada saja masalah yang terkait dengan kependudukan yang ditinjau dari sisi fertilitas, pengaturan kelahiran dan masalah reproduksi. Masalah kependudukan di Indonesia adalah jumlah penduduk yang besar dan distribusi yang tidak merata. Hal itu dibarengi dengan masalah lain yang lebih spesifik, yaitu angka fertilitas dan angka mortalitas yang relatif tinggi. Kondisi ini dianggap tidak menguntungkan dari sisi pembangunan ekonomi. Hal itu diperkuat dengan kenyataan bahwa kualitas penduduk masih rendah sehingga penduduk lebih diposisikan sebagai beban daripada modal pembangunan. Logika seperti itu secara makro digunakan sebagai landasan kebijakan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk

Secara mikro hal itu juga digunakan untuk memberikan justifikasi mengenai pentingnya suatu keluarga melakukan pengaturan pembatasan jumlah anak.

Untuk itu Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana melaksanakan program Keluarga Berencana yang meliputi beberapa kegiatan antara lain².

- a. Melakukan penyuluhan mengenai program keluarga berencana di beberapa desa dan di sekolah-sekolah
- b. Menyarankan untuk mengikuti program keluarga berencana untuk mengurangi jumlah kepadatan penduduk.
- c. Mendata setiap anggota keluarga yang ikut dalam program keluarga berencana.

Dari kegiatan yang dilakukan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana maka tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut adalah³.

- a. Untuk mengurangi kepadatan penduduk di Kabupaten Kulon Progo.
- b. Kesehatan masyarakat lebih terjaga

² Peraturan Bupati Kulon Progo, No 3 tahun 2008, Tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

³ Ibid

- c. Mengurangi kehamilan yang tidak diinginkan agar dapat menjadi keluarga yang harmonis.
- d. Mencegah anak kekurangan gizi, dan tumbuh kembangnya terjamin.
- e. Untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.

Dari kegiatan dan tujuan yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa, Perempuan Dan Keluarga Berencana maka pada awalnya masalah fertilitas lebih dipandang sebagai masalah kependudukan, dan treatment terhadapnya dilakukan dalam rangka untuk mencapai sasaran kuantitatif. Hal ini sangat jelas dari target atau sasaran di awal program keluarga berencana dilaksanakan di Indonesia yaitu menurunkan angka kelahiran total (TFR) menjadi separuhnya sebelum tahun 2000. Oleh karena itu, tidaklah aneh apabila program keluarga berencana di Indonesia lebih diwarnai oleh target-target kuantitatif. Dari sisi ini tidak dapat diragukan lagi keberhasilannya.

Indikasi keberhasilan tersebut sangat jelas, misalnya terjadinya penurunan TFR yang signifikan selama periode 1967 – 1970 sampai dengan 1994 – 1997 . Selama periode tersebut TFR mengalami penurunan dari 5,605 menjadi 2,788 (SDKI 1997). Atau dengan kata lain selama periode tersebut TFR menurun hingga lima puluh persen. Bahkan pada tahun 1998 angka TFR tersebut masih menunjukkan penurunan, yaitu

menjadi 2,6. Penurunan fertilitas tersebut terkait dengan (keberhasilan) pembangunan sosial dan ekonomi, yang juga sering diklaim sebagai salah satu bentuk keberhasilan kependudukan, khususnya di bidang keluarga berencana di Indonesia.

Indikator keberhasilan program Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa, Perempuan Dan Keluarga Berencana dalam program Keluarga Berencana diterapkan sejak tahun 2000, karena program keluarga berencana dilaksanakan di Indonesia untuk menurunkan angka kelahiran total menjadi separuhnya, dan sampai sekarang masih saja diterapkan dalam program keluarga berencana oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa, Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo. Program ini masih berlanjut, karena dirasa membantu dalam mengatasi jumlah kepadatan penduduk yang terjadi akhir-akhir ini.

Dalam perspektif yang lebih luas, persoalan fertilitas tidak hanya berhubungan dengan jumlah anak sebab aspek yang terkait di dalamnya sebenarnya sangat kompleks dan variatif, misalnya menyangkut perilaku seksual, kehamilan tak dikehendaki, aborsi, PMS, kekerasan seksual, dan lain sebagainya yang tercakup di dalam isu kesehatan reproduksi. Respons terhadap hal ini sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah, khususnya oleh BKKBN dan Menteri Negara Kependudukan. Akan tetapi respons tersebut masih belum menyentuh persoalan mendasar yang ada di

dalamnya sehingga isu-isu tersebut belum sepenuhnya tertangani dengan baik.

Kebijakan kependudukan pada masa Orde Baru meskipun dari sisi kuantitatif telah menunjukkan kemajuan yang berarti, namun masih meninggalkan banyak persoalan yang mempunyai kemungkinan meningkat secara signifikan setelah krisis ekonomi.

Dalam masalah kependudukan pemerintah Kabupaten Kulon Progo harus melaksanakan beberapa strategi yang ingin dicapai yang mempertimbangkan salah satu aspek nilai dasar profesionalisme, keterbukaan dan kerjasama. Strategi yang harus di capai antara lain :

1. Kekuatan (*Strength*)

Adanya perundang-undangan yang sangat mendukung, yaitu UU No.23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, yang diharapkan dapat mengatasi kendala yang ada. Adanya sistem alur kerja yang jelas untuk memudahkan pelayanan terhadap kerjasama.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Sumberdaya dan kualitas SDM kurang optimal dalam memberikan pelayanan.

3. Peluang (*Opportunities*)

Banyaknya perusahaan yang beroperasi dan banyak menampung tenaga kerja, sehingga dapat membantu mengurangi pengangguran. Sehingga

jumlah penduduk dalam setiap kecamatan mengalami pengurangan setiap tahunnya.

4. Ancaman (*Threats*)

Mobilitas penduduk yang tinggi, setiap tahunnya penduduk di Kabupaten Kulon Progo meningkat. Banyak perusahaan yang menentukan tingkat pendidikan minimal SMA/SMK. Itu karena Kabupaten Kulon Progo 60% lulusan SMA, maka banyak perusahaan yang mencari tenaga kerja minimal berpendidikan SMA/SMK⁴.

Data penduduk yang komperhensif bisa dikatakan masih terbatas hanya pada periode tertentu saja, misalnya seperti sensus penduduk yang hanya memetakan data penduduk pada periode 10 tahun saja. Padahal di sisi lain dinamika kehidupan masyarakat cepat berubah. Proyeksi penduduk tertuang dalam UU No.23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan diharapkan dapat mengatasi kendala yang ada. Proyeksi ini penting karena dinamika kependudukan yang tinggi, sementara itu dari sisi kualitas dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan.

Keadaan kependudukan di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan mobilitas yang tinggi, hal ini terkait dengan struktur jumlah penduduk yang didominasi oleh kelompok penduduk usia produktif. Komposisi penduduk dengan makin didominasi oleh kelompok usia produktif menunjukkan *efektivitas* penduduk yang tinggi. Adapun jumlah penduduk

⁴ Achmad Nurmandi, Manajemen Pelayanan Publik, Sinergi Publising, Yogyakarta, 2010, hal 178

di Kabupaten Kulon Progo menurut Registrasi selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1.
Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Di Kabupaten Kulon Progo

No	Tahun	Jumlah Penduduk					Kepala Keluarga
		Laki-laki	%	Perempuan	%	Total	
1	2005	223.232	15,47	233.831	10,59	457.063	96.933
2	2006	224.779	58,36	235.316	10,53	460.095	98.538
3	2007	230.615	8,11	202.184	28	432.799	40.351
4	2008	222.504	1,75	233.822	17,87	456.326	42.270
5	2009	240.096	16,31	247.975	33,01	488.071	43.860

Sumber Data : Dinas Dukcapilkabernas Kabupaten Kulon Progo⁵.

Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Kulon Progo di pengaruhi oleh peran pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam menanggapi masalah kependudukan. Tetapi pada tahun 2010 ini masalah kependudukan Kabupaten Kulon Progo mengalami pendataan yang salah dalam menghitungnya, dan bisa mencapai 10.000 jiwa, dari jumlah penduduk 370.000 jiwa, menjadi 470.000 lebih banyak selisihnya dari data Pemerintahan Kabupaten. Dalam masalah kependudukan dan pelaksanaan program-program di dalamnya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya.

⁵ Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2006-2011.

Oleh karena itu program keluarga berencana yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil penting untuk diteliti, karena program keluarga berencana dapat mengurangi kepadatan penduduk khususnya Kabupaten Kulon Progo, yang setiap tahun meningkat kepadatannya, itu terbukti dengan jumlah penduduk pada tahun 2005 sampai 2009 yang meningkat sekitar 2.000 jiwa tiap tahunnya. Jumlah penduduk tahun 2009 sekitar 488.071 jiwa, mengalami penambahan penduduk 2,45% yang terdiri dari laki-laki 240.096 jiwa, perempuan 247.975 jiwa. Dengan rincian berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut: berpendidikan dasar (SD-SMP) berjumlah 202.184 jiwa (41,43%), berpendidikan menengah (SLTA) berjumlah 128.198 jiwa (26,27), berpendidikan tinggi (Diploma, Sarjana, Pascasarjana) berjumlah 26.949 jiwa (5,52%). Sedangkan menurut pekerjaan sebagai berikut: petani/perkebun (26,90%), pelajar/mahasiswa (13,59%), wiraswasta (10,99%), karyawan swasta (7,75%), PNS, TNI, POLRI (2,54%), dan lainnya (38,23%). Dari hasil jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo maka, dapat dilihat bahwa kepadatan penduduk Kabupaten Kulon Progo semakin meningkat.

Oleh karena itu dipilihnya Kabupaten Kulon Progo untuk mengetahui peran Pemerintahan dalam menentukan hasil penyusunan kependudukan, sehingga dapat diketahui bahwa data kependudukan yang lalu dapat diperbaiki lagi, dan sesuai dengan jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo.

B. Rumusan masalah

Dalam melakukan penelitian masalah perlu dirumuskan terlebih dahulu agar penelitian dapat berlangsung pada sasaran obyek yang telah ditentukan. Tujuan utamanya adalah memecahkan suatu masalah.

Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya⁶. Masalah adalah kejadian atau keadaan yang menimbulkan pertanyaan dalam hati kita tentang kedudukan ketika tidak puas dalam melihatnya saja melainkan kita ingin melihat lebih dalam.

Berdasarkan penjelasan diatas sesuai dengan latar belakang masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. “ *Bagaimana Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa, Perempuan Dan keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo Dalam Melaksanakan Program Kependudukan* ”?
2. “ *Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa, Perempuan Dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan program Keluarga Berencana*“?

⁶ Winarno Surachman, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik, Tarsito, Bandung, 1990, hal 34.

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan program kependudukan
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya tahun 2009.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian pada dasarnya dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Secara Teoritis, Manfaat penelitian diharapkan dapat memberikan pengembangan dan menambah kajian dalam ilmu pengetahuan, khususnya tentang bagaimana peran dinas yang ada di daerah. Dalam hal ini mengetahui bagaimana peran dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana dalam meningkatkan dan melaksanakan program-program yang ada.
2. Secara praktis, manfaat penelitian diharapkan dapat menjadi masukan dan bermanfaat bagi:

- a. Peneliti

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana dan diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terutama dalam mengetahui bagaimana peran dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana

- b. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana

Diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat Pemerintah Pusat dan Khususnya pemerintahan Daerah yaitu bagi Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana dalam menyusun proyeksi kependudukan pada tahun yang berikutnya bisa lebih baik.

- c. Masyarakat

Diharapkan dapat ikut serta dalam meningkatkan program kependudukan.

E. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori merupakan kumpulan dari teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian atau upaya penulis dalam melakukan studi kepustakaan guna mendapatkan pemahaman teoritis yang lebih, yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu melalui teori maka akan dapat dijelaskan secara sistematis mengenai hubungan antara konsep/variable yang satu dengan yang lainnya dalam sebuah penelitian.

Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi

“Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proporsi untuk menerangkan suatu fenomena secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep”⁷.

Sedangkan menurut Koentjaraningrat bahwa:

“Teori merupakan pernyataan mengenai suatu akibat atau mengenai adanya hubungan yang positif antara gejala-gejala yang diteliti dari suatu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat”⁸.

⁷ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, Metode Penelitian Survey, LP3, Jakarta, 1989, hal 37.

⁸ Koentjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, PT Gramedia, Jakarta, 1993, hal 9.

Menurut Munandar Soelaiman, teori adalah : “Prinsip-prinsip dasar yang berwujud bentuk aturan atau rumusan yang berlaku umum, menjelaskan hubungan antara dua gejala atau lebih, alat untuk menjelaskan atau pemahaman, dapat diverifikasi, berguna dalam merelakan sesuatu kejadian”⁹.

Berdasarkan pada penjelasan-penjelasan diatas, maka penyusunan akan menyampaikan beberapa teori yaitu sebagai berikut:

1. Peranan

Soerjono Soekamto mengatakan bahwa: Peranan adalah merupakan aspek dinamika dari status (kedudukan), apabila seseorang atau beberapa orang atau organisasi yang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia atau mereka atau organisasi tersebut telah melaksanakan satu peran.¹⁰

Kemudian dalam kamus Bahasa Indonesia Moderen pengertian dari peran dapat di jelaskan sebagai berikut: “Sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa”¹¹.

Menurut pendapat dari Astrid S. Susanto, Peranan mencakup paling sedikit 3 hal yaitu¹²:

- a. Peranan adalah meliputi sarana yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang didalam masyarakat. Peranan dalam hal ini menempatkan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang kedalam kehidupan masyarakat.

⁹ Munandar Soelaiman, Ilmu Sosiaal Dasar, Eresco, Bandung, 1985, hal 10.

¹⁰ Soerjono Soekamto, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pres, Jakarta, 1987, hal 220.

¹¹ Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen, Pustaka Amani, Jakarta, 2000, hal 274.

¹² Astrid S. Susanto, Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial, Bina Cita, 1983, hal 95.

- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang didapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai masyarakat.
- c. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting didalam struktur sosial.

Status yang dimiliki oleh seseorang tidak lepas dari peranan-peranan yang dilakukan orang tersebut kepada masyarakat. Hal ini terjadi karena sistem sosial adalah bentuk interaksi yang bersifat timbal balik. Besarnya peranan seseorang lingkungan sosialnya sangat berpengaruh pada status seseorang. Demikian sebaliknya status yang tinggi adanya peranan yang sangat tinggi pula.

Peran ini oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo dirumuskan kedalam suatu program, yang diharapkan dapat membantu dan mempermudah mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana. Program-program peningkatan kependudukan yang dilakukan adalah: memberikan penyuluhan kepada masyarakat Kulon Progo untuk melakukan program Keluarga Berencana agar penambahan penduduk tidak meningkat.

2. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah merupakan pelaksanaan penanggung jawab semua kegiatan pemerintahan yang ada di daerah otonom. Yang menjadi peran utama dari pemerintahan daerah adalah melaksanakan pelayanan

sebaik mungkin terhadap kepentingan masyarakat dan melaksanakan pelayanan sebaik mungkin terhadap kepentingan masyarakat dan melaksanakan pembangunan sebagai usaha untuk memajukan daerah otonom tersebut.

Menurut The Liang Gie yang dikutip oleh Mashuri Mascab yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah satuan –satuan organisasi pemerintah yang berwenang menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami suatu wilayah¹³.

Menurut Mashuri Mascab Sendiri, Pemerintah Daerah adalah satuan aparatur Negara yang berwenang memerintah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak dan berkewajiban mengatur rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Negara¹⁴.

Menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut pada asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah¹⁵.

¹³ Mashuri Mascab, Pemerintahan Di Daerah, FISIP UGM, Yogyakarta, 1982, hal 32.

¹⁴ ibid

¹⁵ Undang-Undang No 32 Tahun 2004

Dalam hal ini penyusun menekankan topik pembahasan pada pemerintah daerah saja, dalam mengurus semua aktifitas administrasi dan juga pembangunan daerah sebagai kepanjangan tangan dari kewenangan pemerintah pusat. Karena aktifitas tersebut tidak mungkin dilaksanakan secara sentralis. Dengan demikian pemerintah lokal yang amat berperan dalam penyelenggaraan pemerintah dan melaksanakan aktifitas-aktifitas yang tidak mampu ditangani oleh pemerintah pusat, karena keberadaannya lebih dekat dan dapat secara langsung berhubungan dengan masyarakat.

Pemerintah daerah atau pemerintah setempat tidak berstatus sebagai Negara tetapi merupakan bagian dari Negara. Oleh karenanya pemerintah lokal ini tidak mempunyai undang-undang dasar, namun demikian pemerintah ini menyelenggarakan kegiatan-kegiatannya dengan ketentuan-ketentuan yang disubkoordinasikan kepada pemerintah nasional. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan tentang pengertian pemerintahan yang dibentuk dalam wilayah Negara sebagai akibat diterapkannya asas atau sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan. Selanjutnya pemerintah daerah merupakan aparatur atau organisasi yang berwenang berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dalam hubungan dengan konsep organisasi. Maka pemerintah baik pemerintah nasional maupun pemerintah daerah menurut Mariun

dimasukkan sebagai organisasi. Beliau menjelaskan bahwa yang termasuk unsur-unsur organisasi antara lain adalah:¹⁶.

- a. Kelompok orang yang mempunyai tujuan bersama
- b. Hanya dapat diselenggarakan dengan kerja sama
- c. Atau usaha bersama agar anggota kelompok itu dapat bekerja sama
- d. Dengan, pembagian kerja di bawah satu pimpinan

Oleh karena itu apabila dikaitkan dengan istilah kegiatan dari sekelompok manusia yang bekerjasama dan merupakan aparatur pemerintah/organisasi yang diberikan kewenangan, hak atau kewajiban untuk mengatur dan mengasumsikan urusan-urusan rumah tangganya sendiri dengan pembagian kerja di bawah pemerintah pusat.

3. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana

Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan pemerintah kabupaten adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai eksekutif daerah. Sesuai dengan pembagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota yang bersifat otonom, maka mempunyai kewenangan dan keluesan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat daerah yang dibentuk berdasarkan atas desentralisasi adalah daerah

¹⁶ Mariun, Op.Cit, hal 13

kabupaten dan kota yang berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Dalam undang-undang tentang otonomi daerah tercantum wewenang dan kebebasan bagi daerah yaitu daerah diberikan wewenang dan kebebasan dalam membentuk instansi-instansi, lembaga-lembaga dan lain-lain yang berhubungan dengan pembangunan dan kelancaran administrasi daerah. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang Mensejahterakan masyarakat melalui Keluarga Berencana. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dasar hukum organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo adalah Perda No 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah, serta Perhub No 64 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Kependudukan Dan Catatan Sipil. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas dan fungsi kependudukan

Fungsi Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di

bidang kependudukan dan catatan sipil. Sedangkan untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Dinas Kependudukan dan catatan Sipil mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan tugas di bidang kependudukan,
- b. Menyelenggarakan kegiatan di bidang data dan teknologi informasi,
- c. Menyelenggarakan kegiatan di bidang pencatatan sipil,
- d. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

4. Program Kependudukan

Program kependudukan adalah ranbagan mengenai asas-asas serta dengan usaha-usaha dalam ketatanegaraan, perekonomian dan sebagainya yang akan dijalankan agar tercapai suatu tujuan-tujuan yang diharapkan khususnya dalam masalah kependudukan. Maslah program kependudukan diantaranya melayani masyarakat dalam pembuatan SKPPT (Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap) yang diberikan kepada WNA, pembuatan SKPPS (Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara), surat izin penduduk, dan KK (Kartu Keluarga).

Selain melayani masyarakat dalam pembuatan berbagai surat, program kependudukan yang lainnya adalah program KB.

5. Implementasi Kebijakan

- a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Mazmanian dan Sabatiar menjelaskan konsep Implementasi kebijakan sebagai berikut:

“Di dalam mempelajari masalah Implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami “apa” yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijaksanaan negara, baik itu menyangkut usaha-usaha pengadministrasian maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa”¹⁷.

Sedangkan Udoji menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian sesuatu rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di implementasikannya”¹⁸.

Jadi dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa:

Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan dari kebijakan negara yang telah disyahkan, agar apa yang terkandung dalam kebijakan tersebut dapat diwujudkan dalam keadaan nyata dan sesuai dengan rencana yang ada, baik menyangkut usaha-usaha pengadministrasian maupun usaha-usaha yang memberikan dampak pada masyarakat.

b. Model-model Implementasi kebijakan

Untuk lebih memahami implementasi kebijakan maka dikembangkan beberapa model Implementasi Kebijakan, antara lain:

1. Model Implementasi Van Meter dan Van Horn

Model yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn memiliki 6 variabel yang membentuk ikatan (linkage) antara kebijakan dan pencapaian (performance). Model ini tidak hanya menentukan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas

¹⁷ Mazmanian dan Sabatiar, dalam Solichin, Pengantar Analisis Kebijakan Negara, Rineka Cipta, Jakarta 1990, hal 123.

¹⁸ Udoji, dalam Solichin, 1997, *Op.Cit*, hal 59.

dan variabel terikat mengenai kepentingan-kepentingan, tetapi juga menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas.

Variabel-variabel bebas itu adalah:

- 1) Ukuran dan tujuan kebijaksanaan
- 2) Sumber-sumber kebijaksanaan
- 3) Ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana.
- 4) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.
- 5) Sikap para pelaksana
- 6) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik¹⁹.

2. Model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier mengembangkan model Proses Implementasi kebijakan yang disebut dengan kerangka analisis implementasi. Kedua ahli ini berpendapat bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijaksanaan Neagra ialah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi.

Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklarifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori besar, yaitu:

- 1) Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan.

¹⁹ Solichin Abdul Wahab. 1997. OP.Cit. hal 80-81

- 2) Kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya
- 3) Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijaksanaan tersebut²⁰.

3. Model Grindle

Menurut Grindle bahwa implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya.

Isi kebijakan meliputi:

- 1) Kepentingan yang dipengaruhi
Kepentingan yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda akan sulit diimplementasikan dibanding yang menyangkut sedikit kepentingan.
- 2) Tipe Manfaat
Suatu kebijakan yang memberikan manfaat dan langsung dapat dirasakan oleh sasaran, bukan hanya formal, ritual dan simbolis akan lebih mudah diimplementasikan
- 3) Derajat Perubahan
Kebijakan cenderung lebih mudah diimplementasikan jika dampak yang diharapkan dapat memberi hasil yang

²⁰ Solichin Abdul Wahab. 1997. Op.Cit. hal 80-81

pemanfaatannya jelas dibandingkan yang bertujuan terjadi perubahan sikap dan perilaku penerima kebijakan

4) Letak pengambil keputusan

Kedudukan pembuat kebijakan akan mempengaruhi implementasi selanjutnya pembuatan kebijakan yang mempunyai kewenangan dan otoritas yang tinggi akan lebih mudah dan mempunyai wewenang dalam pengordinasian organisasi dibawahnya.

5) Pelaksana program

Keputusan siapa yang ditugasi untuk mengimplementasikan program yang ada dapat mempengaruhi proses implementasi dan hasil akhir yang diperoleh. Dalam hal ini tingkat kemampuan, keefektifan dan dedikasi yang tinggi akan berpengaruh pada proses.

6) Sumber daya yang dilibatkan

Sumber daya yang digunakan dalam program, bentuk, besar dan asal sumber daya akan menentukan pelaksanaan dan keberhasilan kebijakan.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Amir Santoso mengutip pendapat Van Meter dan Van Horn tentang variabel-variabel yang membentuk kaitan antara lain: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, aktifitas komunikasi

antara organisasi dan aktifitas pelaksanaan (*enforcement*) karakteristik dari agen pelaksana, kondisi sosial politik dan ekonomi, disposisi dari pelaksana dan penyelenggaranya²¹.

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan dalam pelaksanaan suatu kebijakan harus memperhatikan faktor-faktor yang memungkinkan tujuan dan maksud pelaksanaan kebijakan tersebut dapat tercapai. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Komunikasi

Tersediannya informasi mengenai pelaksanaan suatu program ataupun informasi yang berkaitan dengan program tersebut sangat dibutuhkan. Sehingga komunikasi aktor-aktor pelaksanaannya sangat diperlukan untuk mengetahui informasi tersebut.

2. Sumber Daya

Pembagian potensi-potensi yang ada harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh aktor-aktor pelaksanaannya.

3. Sikap pelaksana/disposisi

Sifat pelaksana yang akomodatif merupakan syarat yang diperlukan untuk lancarnya suatu program.

4. Struktur Birokrasi

Struktur yang ada harus menggambarkan suatu struktur yang ada tidak statis tetapi memperdayakan suatu staff yang ada.

²¹ Merle. S Grindle, *Politics and Policy Implementation in the Third World*, Princenton University Press, New Jersey 1980, hal 6.

F. Definisi Konseptional

Definisi konseptional bisa disebut sebagai suatu pengertian dari kelompok atau yang menjadi pokok perhatian. Definisi konseptional ini dimaksudkan sebagai gambaran yang lebih segar untuk menghindari kesalahpahaman tentang pengertian atau pembatasan pengertian tentang istilah yang ada dalam pokok permasalahan.

Koentjaraningrat mengatakan bahwa:

Konsep atau pengertian merupakan unsur pokok dari suatu penelitian, dan jika masalah dan kerangka teoritisnya sudah jelas biasanya sudah diketahui pula faktanya mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok perhatian dan suatu konsep yang sebenarnya merupakan definisi secara singkat dari kelompok fakta atau gejala tersebut²².

Adapun konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana

Peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana adalah semua yang dijalankan atau yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai dengan tujuan dan program-program yang dibuat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Program-program tersebut mengacu pada

²² Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta Gramedia, 1993, hal 21.

tugas pokok dan fungsi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat
Pemerintah Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana

2. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana

Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa, Perempuan dan
Keluarga Berencana adalah unsur Perangkat Daerah sebagai pelaksana
kewenangan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat, perempuan
dan keluarga berencana, yang berada dibawah tanggungjawab kepada
Bupati dan Sekretaris Daerah.

3. Program Kependudukan

Program yang paling utama adalah masalah program keluarga
berencana yang menyebabkan jumlah penduduk di suatu daerah
bertambah, jika di setiap daerah tidak dilaksanakan program keluarga
berencana.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional dijadikan pegangan dalam melakukan
penelitian. Menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi definisi
operasional adalah petunjuk bagaimana suatu variabel, dengan
menggunakan landsan²³. Adapun definisi operasional ini dimaksudkan
untuk memperjelas dan memperinci konsep yang telah dikemukakan
sebelumnya.

²³ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, Opcti, hal, 23

Dalam penelitian ini menggunakan indikator-indikator yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi serta program-program dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana. Dari beberapa program yang dimiliki, di sini peneliti hanya memfokuskan pada program keluarga berencana yang dapat mendukung penulisan ini.

Program Keluarga Berencana antara lain:

1. Bidang Program Keluarga Berencana
2. Bidang Program Keluarga sejahtera

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program keluarga berencana antara lain:

a. Komunikasi

Kejelasan dalam memberikan perintah kepada aparat pelaksana untuk melaksanakan program dan koordinasi dalam pelaksanaan program keluarga berencana, yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana berjalan sesuai dengan rencana.

Unsur-unsur komunikasi:

1. Komunikatior

Pengirim yang mengirimkan pesan kepada komunikan dengan menggunakan media tertentu. Unsur yang sangat berpengaruh dalam komunikasi, karena merupakan awal terjadinya suatu komunikasi.

2. Komunikasikan

Penerima yang menerima pesan dari komunikator, kemudian memahami, menerjemahkan dan akhirnya memberi respon

3. Media

Saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan sebagai sarana berkomunikasi. Berupa gambar, tulisan, bahasa tubuh.

4. Pesan

Isi komunikasi berupa pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan.

5. Tanggapan

Merupakan dampak komunikasi sebagai respon atas penerimaan pesan.

b. Sumber Daya

b.1. Sumber daya manusia: sumber-sumber yang dilakukan dalam pelaksanaan program atau sumber yang terlibat dalam pelaksanaan program keluarga berencana.

b.2. Sumber daya dana: sumber yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan program-program keluarga berencana.

b.3. Sumber daya waktu: sumber yang direncanakan oleh pemerintah dengan tujuan program yang dilaksanakan berjalan dengan baik.

c. Sikap pelaksana/disposisi

Pengetahuan dan kemampuan yang cukup dari aparat pelaksana untuk melaksanakan kegiatan dan kesesuaian aturan kebijakan dengan aturan pelaksana.

d. Struktur Birokrasi

Kejelasan struktur dan penempatan posisi di lingkungan masyarakat.

H. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian, metodologi sangat berperan dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian dengan kata lain setiap penelitian harus menggunakan metodologi sebagai tuntutan berfikir yang sistematis agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah²⁴.

1. Jenis Penelitian

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah untuk menggambarkan atau untuk mencari hubungan yang terdapat pada suatu permasalahan yang bertujuan mengumpulkan data. Menurut Hadari Nawawi:

Metode penelitian diskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah keadaan subyek, obyek (seseorang, lembaga masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nyata atau dampak atau sebagaimana adanya²⁵.

Selanjutnya metode penelitian deskriptif ini sering disertai ciri-ciri sebagai berikut ini:

²⁴ Winarno Surachman, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik, Tarsito, Bandung, 1990, hal 34

²⁵ Hadari Nawawi, Metode Penelitian Sosial, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993

- a. Memusatkan diri pada pemecahan masalah yang ada pada saat sekarang pada masalah-masalah aktual.
- b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dianalisa.

Sedangkan yang dimaksud deskriptif kualitatif yaitu suatu analisa data telah masuk, untuk kemudian diadakan pengelolaan dari data tersebut sehingga akan tersusun dalam bentuk pengerutan, gambaran, dan mengklarifikasikan terhadap masalah-masalah yang sedang diteliti sehingga dapat diambil satu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan²⁶

1. Unit Analisis

Sesuai dengan permasalahan yang ada pada pokok pembahasan masalah dalam penelitian ini, maka yang akan dijadikan unit analisis adalah staf dan karyawan beserta pimpinan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana, BPS, serta Pemerintah Daerah Kulon Progo berikut instansi-instansi yang terkait di dalamnya.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data yang diperoleh dari keterangan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian, di mana data tersebut diperoleh terutama dari pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa,

²⁶ Winarno Surachman, Pengantar Penelitian Ilmiah, Tarsito, Bandung, 1982, hal, 140.

Perempuan dan Keluarga Berencana, BPS serta Pemerintah daerah Kulon Progo.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari media massa, buku, kliping, dan dokumen-dokumen yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data yang diperlukan dan obyek penelitian akan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview/wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Maksud mengadakan wawancara, seperti yang ditegaskan oleh Lincon dan Guba, antara lain: mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, tuntunan, dan lain-lain²⁷.

Interview atau wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan yaitu dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo.

²⁷ Dr. Lexy J. Moleong, M.A, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

b. Dokumentasi

Merupakan langkah yang ditempuh untuk mengumpulkan data-data melalui dokumen atau catatan yang tersedia di dalam suatu organisasi dengan materi yang diambil.

c. Observasi/Pengamatan

Observasi atau pengamatan adalah pengambilan dengan menggunakan mata tanpa ada alat standar lain untuk membantu atau keperluan pengamatan.

Pengamatan atau observasi bisa dikatakan sebagai teknik pengumpulam data, jika memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut²⁸:

1. Pengamatan digunakan untuk penelitian dan telah direncanakan secara sistematis.
2. Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah direncanakan
3. Pengamatan tersebut dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proporsi umum dan bukan suatu set yang menarik perhatian saja.
4. Pengamatan dapat dicek dikontrol atas kevaliditasannya

4. Jenis Data

Karena yang digunakan adalah metode deskriptif yang dibutuhkan adalah data primer dan data sekunder.

²⁸ Moh Nazir, Ph. D, Metode Penelitian, cetakan ketiga, 1988, hal 212

- a. Data primer: Data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang diperoleh.
- b. Data sekunder: Data yang diperoleh lewat pihak lain dan tidak langsung di ambil dari subyek penelitian²⁹.

5. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan metode penelitian, dalam hal ini maka proses analisa data yang diteliti penyusun menggunakan teknik analisis data kualitatif.

Teknik ini dilaksanakan dengan cara mengklarifikasikan data lalu menganalisa sesuai dengan gejala dari obyek yang diteliti tanpa menggunakan perhitungan angka. Tujuan dari analisa data pada dasarnya adalah penyerdehanaan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami. Analisis data adalah proses perumusan data agar dapat diklarifikasikan kerja keras, daya kreatif serta intelektual yang tinggi. Analisa data juga diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian.

Dalam teknik ini peneliti mencoba melakukan dengan membuat pengklarifikasian data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang digunakan seperti terdiri dari catatan lapangan, catatan peneliti, dokumentasi berupa laporan, studi pustaka, artikel, wawancara dan sebagainya. Teknik analisis data dapat dilakukan dengan dua tahapan

²⁹ Saifudin Azwar, MA, Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal 91.

yaitu menyajikan data kemudian menarik kesimpulan, selain itu pula dilakukan siklus antar tahap tersebut sehingga data yang terkumpul akan berhubungan satu dengan yang lain secara sistematis.

Adapun proses yang dilakukan dalam analisa data ini adalah:

1. Reduksi Data

Tahap ini meliputi proses manipulasi, integrasi, transformasi data dan menyortir data ketika data itu disajikan. Tahap ini dilakukan dengan cara antara lain peningkatan, pengkodean, dan pengkategorisasikan data. Reduksi data membantu mengidentifikasi aspek-aspek penting dari pertanyaan sampel, metode-metode sehingga akhirnya pada suatu kesimpulan.

2. Pengorganisasian Data

Merupakan proses penyusunan semua informasi seputar tema-tema tertentu, pengkategorian informasi dalam cakupan yang lebih spesifik dan menyajikan hasilnya dalam beberapa bentuk.

3. Interpretasi Data

Proses ini mencakup pembuatan keputusan-keputusan dan membuat kesimpulan yang berkaitan dengan pertanyaan dalam penelitian. Pada tahap ini dilakukan pengidentifikasian pola-pola dan kejegan, juga menemukan kecenderungan-kecenderungan. Memberikan penjelasan terhadap aspek-aspek tertentu yang memungkinkan pengembangan beberapa sudut pandang yang lebih tegas untuk menuntun penelitian selanjutnya